

**PERKEMBANGAN KONVERSI HUTAN KE PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT TERHADAP KUALITAS PEMBAGUNAN EKONOMI DI
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : ELVA NURLIA NINGSIH
NPM : 1805180003
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Terpercaya Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pukul 13.30 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : ELVA NURLIA NINGSIH
NPM : 1805180003
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KONVERSI HUTAN KE PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN
EKONOMI DI PROVINSI RIAU

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Pengji I

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Pengji II

(ERI YANTI NASUTION, S.E., M.Ec)

Pembimbing

(Dra. Hj. LAHLAN SYAFINA HSB, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc.Prof.Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ELVA NURLIA NINGSIH
NPM : 1805180003
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KONVERSI HUTAN KE PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk di ajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

(Dra. Hj. Lailan Syafina Hsb., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(DR. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVA NURLIA NINGSIH
Npm : 1805180003
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 15 Oktober 2022

Yang Menyatakan


ELVA NURLIA NINGSIH

ABSTRAK

Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau

ELVA NURLIA NINGSIH
1805180003

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

E-mail : elvanurlianingsih@gmail.com

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi lainnya yang terjadi di suatu negara. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu Menganalisis Perkembangan Hutan Di provinsi Riau, Menganalisis Perkembangan Perkebunan Kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau, Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder, Adapun hasil penelitian ini yaitu Tahun 2017 produksi perkebunan kelapa sawit mencapai angka 7.591,20 ribu ton, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 8.496 ribu ton, pada tahun 2019 sebesar 9.512,90 ribu ton, pada tahun 2020 sebesar 9.984,30 ribu ton. Sedangkan, pada tahun 2021 produksi tanaman perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 8.629,10 ribu ton, Variabel Luas Hutan dan Konversi hutan terhadap Pendapatan Perkapita memiliki nilai probabilitas (F statistic) sebesar 0.000063 dan nilai F statistic sebesar 34.12688

Kata Kunci : Konversi Hutan, Perkebunan Kelapa Sawit, Pembangunan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Asaalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Rezeki-nya yang sangat luar biasa kepada penulis, serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis,

sehingga atas izin-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Keluarga yang tercinta, terutama kepada kedua orangtua terkasih, Alm Ayahanda (H.Sudiono) dan Ibunda (Hj.Suparmi) sebagai sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampek detik ini, baik itu semangat maupun materi. Serta Abang (dr.Nurianto) Kakak Ipar (Say Batul Nasbah S.Ked) dan Adik (Angga Cahya Ramadhani) yang telah memberikan semangat dalam pengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani,M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januari, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan., S.E.,M.Si yang merupakan Wakil Dekan 1 Falkutas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si yang merupakan Wakil Dekan III Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS.,S.E.,M.Si, Selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Pembangunan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Roswita Hafni M.Si, selaku Seketaris Progam Studi Ekonomi Pembangunan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universita Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra.Hj. Lailan Syafina Hsb., M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/ arahan/ masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

10. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmunya yang bermanfaat.
11. Kepada seluruh staf biro Falkutas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Untuk Alfi, Kak Tia, Rachma, Doni, Fina yang banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman seperjuangan skripsi, Ungsi, Icha, Putri, Diah, dan Ratna yang banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman studi Ekonomi Pembangunan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulis kedepan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2022

Elva Nurlia Ningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Batasan Masalah.....	17
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian.....	18
BAB IILANDASAN TEORI	20
2.1 Uraian Teoritis.....	20
2.1.1Teori Pendapatan Nasional	20
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi	31
2.2 Regulasi.....	35
2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Hutan.....	37
2.3 Penelitian Terdahulu	38
2.4 Kerangka Penelitian	40
2.4.1. Kerangka Konseptual Penelitian	40
2.5 Hipotesis Penelitian.....	40
BAB IIIMETODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.3 Definisi Operasional.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis	44
3.5.1 Analisi Deskriptif Kualitatif.....	44

3.5.2 Analisis Model Ekonometrika.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.2 Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Riau.....	53
4.3 Perkembangan Kelapa Sawit Provinsi Riau.....	62
4.4 Analisis Model Ekonometrika	66
4.4.1 Asumsi Klasik.....	66
4.4.2 Koefisien Determinasi	68
4.4.3 Interpretasi Hasil.....	68
4.4.4 Interpretasi Hasil Uji T dan Uji F	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan Penelitian	72
5.3 Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PBD Indonesia Tahun 2017-2021	2
Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha (miliar rupiah)	4
Tabel 1.3 Luas Hutan di Indonesia Tahun 2017-2020	7
Tabel 1.4 Luas Hutan Berdasarkan Provinsi	7
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Riau Tahun 2017-2021	13
Tabel 4.1 Luas Hutan Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)	53
Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)	55
Tabel 4.3 Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)	56
Tabel 4.4 Luas Hutan Produksi Konversi 2019 - 2021	58
Tabel 4.5 Luas Hutan Lindung Provinsi Riau tahun 2019 – 2021 (hektar)	59
Tabel 4.6 Luas Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (hektar)	61
Tabel 4.7 Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau 2017 – 2021 (ribu hektar)	62
Tabel 4.8 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten	62
Tabel 4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau 2017 – 2021 (ribu ton)	63
Tabel 4.10 Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten	64
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.12 Uji Heterokesdatisitas	67
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.14 Regresi Linear Berganda	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi lainnya yang terjadi di suatu negara. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang saling berkaitan dalam menentukan kemajuan suatu negara atau wilayah. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Asyafiq, 2019). Disamping itu, pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari adanya proses kegiatan pembangunan, baik perannya dalam pembentukan nasional maupun daerah.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat aktivitas ekonomi diwaktu tersebut lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambahn besar pada tahun-tahun berikutnya (Faroh, 2016:34). Pertumbuhan ekonomi atau *EconomicGrowth* adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Mankiw, 2018:9). Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GrossDomesticProduct (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN) (Tambuhan, 2014:40).

Disamping itu, pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan output (hasil produksi ekonomi) berdasarkan kemajuan teknologi. Dari hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan produksi dalam suatu negara dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan perubahan fundamental ekonomi suatu negara dalam periode jangka panjang.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara tersebut.

Tabel 1.1 PDB Indonesia Tahun 2017-2021

PDB Indonesia Tahun 2017-2021	Harga Konstan 2010				
	2021 Tahunan	2020 Tahunan	2019 Tahunan	2018 Tahunan	2017 Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1403710.00	1378331.40	1354399.10	1307253.00	1258375.70
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1072507.00	1061023.20	1038902.90	1005655.00	970262.90
a. Tanaman Pangan	298733.30	303453.70	292883.00	298027.30	293858.00
b. Tanaman Hortikultura	160429.60	159539.30	153157.80	145131.20	135649.00
c. Tanaman Perkebunan	425042.60	410570.40	405147.50	387496.70	373194.20
d. Peternakan	167629.10	167057.70	167637.90	155539.90	148688.80
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	11118868.50	10723054.80	10949155.40	10425851.90	9912928.10

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan pasal 3 menyebutkan bahwasanya berdasarkan fungsinya salah satunya sebagai hutan produksi dapat dilihat dari PDB pada tabel 1.1 diatas. Pada sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi/sumbangsi sebesar 1.258.375,70 Milyar rupiah pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 sebesar 1.403.710,00 Milyar rupiah. Jika dilihat dari tabel diatas setiap tahunnya kontribusi sektor tersebut terus mengalami kenaikan. Dari tahun 2017-2020 kenaikan PDB pada setor tersebut mencapai 145.333,3 Milyar rupiah. Berdasarkan sub sektor Taman holtikultura pada tahun 2017 memberikan sumbangsi/kontribusi PDB sebesar 135.649,00 Milyar dari total Indonesai tahun 2017 sebesar 9.912.928,10 Milyar rupiah dan di tahun 2021 dengan PDB Indonesia sebesar 11.118.868,50 Milyar rupiah dengan sumbangsi sub sektor tanaman holtikultura sebesar 160.429,60 Milyar rupiah. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sub sektor tersebut cukup mempengaruhi nilai dari PDB Indonesia.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa menurut besaran PDB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% pada 2021. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Namun, capaian tersebut masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Hampir semua sektor mencatat pertumbuhan sepanjang tahun lalu, kecuali lapangan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan Sosial wajib yang mengalami kontraksi sebesar 0,33% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB Indonesia menurut Sektor pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kesehatan & Kegiatan Sosial tumbuh 10,46%, Informasi & Komunikasi tumbuh 6,81%, Pengadaan Listrik & Gas tumbuh 5,55%, Pengadaan

Air & Pengelolaan Sampah tumbuh 4,97%, Perdagangan Besar & Eceran tumbuh 4,65 %, Pertambangan & Penggalian tumbuh 4,00%, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum tumbuh 3,89%, Industri Pengolahan tumbuh 3,39%, Transportasi & Pergudangan tumbuh 3,24%, Konstruksi tumbuh 2,81%, Real Estate tumbuh 2,78%, Jasa lainnya tumbuh 2,12%, Pertanian tumbuh 1,84%, Jasa Keuangan & Asuransi tumbuh 1,56%, Jasa Perusahaan tumbuh 0,73%, Jasa Pendidikan tumbuh 0,11%, Administrasi Pemerintahan tumbuh -0,33%

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan melalui tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana PDB tersebut terbagi kedalam sembilan sektor ekonomi yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa lainnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) berarti meningkat pula kesejahteraan dan kemakmuran penduduk. Berikut ini merupakan tren PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha (miliar rupiah)

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Harga Konstan 2010				
	2021	2020	2019	2018	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 403 710.00	1 378 331.40	1 354 399.10	1 307 253.00	1 258 375.70
B. Pertambangan dan Penggalian	822 099.50	790 475.20	806 206.20	796 505.00	779 678.40
C. Industri Pengolahan	2 284 821.70	2 209 920.30	2 276 667.80	2 193 368.40	2 103 466.10
D. Pengadaan Listrik dan Gas	114 861.10	108 826.40	111 436.70	107 108.60	101 551.30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9 919.20	9 449.30	9 004.90	8 429.40	7 985.30
F. Konstruksi	1 102 517.70	1 072 334.80	1 108 425.00	1 048 082.80	987 924.90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 450 226.30	1 385 747.40	1 440 185.70	1 376 878.70	1 311 746.50
H. Transportasi dan Pergudangan	406 187.60	393 437.90	463 125.90	435 336.50	406 679.40

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	310 754.70	299 122.40	333 304.60	315 068.60	298 129.70
J. Informasi dan Komunikasi	696 460.40	652 062.90	589 536.10	538 762.70	503 420.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	464 638.60	457 482.90	443 093.10	415 620.60	398 971.40
L. Real Estate	333 282.90	324 259.40	316 901.10	299 648.20	289 568.50
M,N. Jasa Perusahaan	197 106.70	195 671.10	206 936.20	187 691.10	172 763.80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364 233.40	365 439.30	365 538.80	349 277.60	326 514.30
P. Jasa Pendidikan	350 655.30	350 264.60	341 349.90	321 133.80	304 810.80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157 104.70	142 228.40	127 487.90	117 322.20	109 497.50
R,S,T,U. Jasa lainnya	200 772.90	196 608.70	205 011.40	185 405.60	170 174.80
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	11 118 868.50	10 723 054.80	10 949 155.40	10 425 851.90	9 912 928.10

Sumber : Badan Pusat Statisti, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sektor riil yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah industri pengolahan sebesar 2.209.920,30 milyar pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 2.284.821,70 milyar rupiah pada tahun 2021. Sedangkan kontribusi kedua yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.385.747,40 milyar rupiah pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 1.450.226,30 milyar rupiah. Kontribusi ketiga ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.378.331,40 miliar pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1.403.710,00.

Besarnya Produk Domestik Bruto Indonesia tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai sector lapangan usaha yang ada di Indonesia. Salah satunya yang paling berkontribusi yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Berikut ini merupakan PDB sector pertanian, kehutanan dan perikanan, salah satu sub sektornya adalah sub sector kehutanan.

Dari perhitungannya, nilai hutan jika semata kayu hanya Rp 400 per meter persegi per tahun. Nilai ini akan naik 3 kali lipat jika jadi sawah, naik 10 kali jika jadi perkebunan kelapa sawit, dan naik 100 kali lipat jika jadi perumahan. Karena itu, pemerintah terdorong melepaskan kawasan hutan untuk tujuan lain yang lebih menghasilkan secara ekonomi.

Nilai Hutan, dari 125 juta hektare, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kehutanan hanya 0,6%. Kawasan hutan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, akibatnya hutan dikonversi menjadi lahan yang lebih menguntungkan. Kecilnya nilai tersebut membuatnya dikonversi ke lahan yang lebih menguntungkan. Deforestasi dan degradasi lahan tak akan bisa dihentikan sepanjang nilainya tak memberikan manfaat ekonomi.

Hutan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Keberadaan hutan telah memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang mendiami sekitar kawasan hutan. “Hutan merupakan sumber plasma nutfah, sumber hasil kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata” (Erika, 2014:11). Selain itu hutan memiliki fungsi utama sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan penghasil gas oksigen terbesar yang memberikan manfaat bagi manusia untuk tetap bertahan hidup. Keberadaan hutan wajib disyukuri, diurus dengan baik, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yaitu bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Indonesia memiliki hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, mencakup hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan

Papua. Menurut data ForestWatch Indonesia (FWI) pada 2013, ada sebanyak 82 hektar luas daratan Indonesia yang masih tertutup oleh hutan.

Tabel 1.3 Luas Hutan di Indonesia Tahun 2017-2020

Tahun	Luas Hutan
2017	125.922.474,73
2018	125.921.113,73
2019	125.817.021,96
2020	125.817.021,96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Luas hutan Indonesia dari tahun 2017-2020 terluas mengalami Angka penurunan deforestasi. Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2017 Indonesia memiliki luas hutan sebesar 125.922.474,73 dan di tahun 2018 sebesar 125.921.113,73. Adanya penurunan sebesar 1.361 hektar pada tahun 2018. Hingga pada tahun 2020 hutan Indonesia memiliki luas lahan hutan sebesar 125.817.021,96. Total penurunan lahan dari tahun 2017-2020 sebanyak 105.452,77 hektar. Penurunan ini terjadinya perubahan fungsi yang dilakukan.

Tabel 1.4 Luas Hutan Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	3.563.813,00	3.563.813,00	3.550.390,23	3.550.390,23
2	Sumatera Utara	3.055.795,00	3.055.795,00	3.055.795,00	3.055.795,00
3	Sumatera Barat	2.380.057,00	2.380.057,00	2.380.057,00	2.380.057,00
4	Riau	5.406.992,00	5.406.992,00	5.406.992,00	5.406.992,00
5	Jambi	2.098.535,00	2.098.535,00	2.098.535,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	3.457.858,00	3.456.797,00	3.456.797,00	3.456.797,00
7	Bengkulu	924.631,00	924.631,00	924.631,00	924.631,00
8	Lampung	1.004.735,00	1.004.735,00	1.004.735,00	1.004.735,00
9	Kep. Bangka Belitung	643.615,00	643.615,00	643.615,00	643.615,00
10	Kepulauan Riau	382.132,10	381.832,10	381.832,10	381.832,10

11	DKI Jakarta	108.475,45	108.475,45	108.475,45	108.475,45
12	Jawa Barat	816.603,00	816.603,00	816.603,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	757.250,00	757.250,00	757.250,00	757.250,00
14	D.I Yogyakarta	16.819,52	16.819,52	16.819,52	16.819,52
15	Jawa Timur	1.361.146,00	1.361.146,00	1.361.146,00	1.361.146,00
16	Banten	253.254,00	253.254,00	253.254,00	253.254,00
17	Bali	130.686,01	130.686,01	130.686,01	130.686,01
18	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,00	1.046.959,00	1.046.959,00	1.046.959,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,00	1.742.399,00	1.742.399,00	1.742.399,00
20	Kalimantan Barat	8.389.600,00	8.389.600,00	8.389.600,00	8.389.600,00
21	Kalimantan Tengah	12.719.707,00	12.719.707,00	12.719.707,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Selatan	1.779.982,00	1.779.982,00	1.779.982,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	13.833.112,65	13.833.112,65	13.831.942,65	13.831.942,65
24	Sulawesi Utara	764.739,00	764.739,00	764.739,00	764.739,00
25	Sulawesi Tengah	4.274.687,00	4.274.687,00	4.274.687,00	4.274.687,00
26	Sulawesi Selatan	2.725.796,00	2.725.796,00	2.636.297,00	2.636.297,00
27	Sulawesi Tenggara	3.830.579,00	3.830.579,00	3.830.579,00	3.830.579,00
28	Gorontalo	824.668,00	824.668,00	824.668,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	1.092.376,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	3.919.617,00	3.919.617,00	3.919.617,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	2.515.220,00	2.515.220,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua Barat	9.713.137,00	9.713.137,00	9.713.137,00	9.713.137,00
33	Papua	30.387.499,00	30.387.499,00	30.387.499,00	30.387.499,00
Indonesia		125.922.474,73	125.921.113,73	125.817.021,96	125.817.021,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas Provinsi yang memiliki luas wilayah hutan luas ada di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia wilayah Timur. Provinsi Papua merupakan Provinsi yang menduduki peringkat pertama yang memiliki luas wilayah terluas dengan luas wilayah tahun 2020 sebesar 30.387.499,00 di urutan

kedua ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur, Utara, dan Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 13.831.942,65 dan 12.719.707,00. Satu satunya Provinsi yang berada di Indonesia bagian Barat yang menduduki 6 besar kategori hutan terluas di Indonesia adalah Provinsi Riau dengan luas sebesar 5.406.992,00.

Berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan pasal 3 menyebutkan bahwasanya berdasarkan fungsinya hutan ditetapkan sebagai hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka, dan hutan untuk wisata. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan Produksi adalah kawasan hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Pemungutan hasil hutan harus berdasarkan asas kelestarian hutan. Hutan suaka alam ialah kawasan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan hayati. Hutan wisata adalah hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata.

Jumlah lahan yang terus menurun dikarenakan adanya perubahan dari fungsi lahan tersebut atau yang biasa disebut dengan konversi lahan. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian telah menjadi permasalahan, baik secara ekonomi maupun masalah lingkungan di negara ini. Penyebabnya, penambahan penduduk dan aktivitas pembangunan yang terjadi pada berbagai bidang. Sehingga permintaan akan lahan terus bertambah, sedangkan jumlah ketersediaannya terbatas.

Konversi Lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Utomo dkk, 1992). Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan hutan yang masih produktif.

Dalam buku Agenda 21 Indonesia disebutkan bahwa faktor-faktor yang menekan kerusakan hutan Indonesia, adalah: a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata, b) konversi hutan untuk pengembangan perkebunan dan pertambangan, c) pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam, d) program transmigrasi, e) pencemaran industri dan pertanian pada hutan lahan basah, f) degradasi hutan bakau yang disebabkan oleh konversi menjadi tambak, g) pemungutan spesies hutan secara berlebihan dan h) introduksi spesies eksotik.

Disamping itu, Dalam rangka mengatasi alih penjaagaan lingkungan dan dampaknya di Indonesia, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki beberapa program yang telah berjalan. Usaha pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam salah satu agenda PBB yaitu *SustainableDevelopment Goals* (SDGs) tujuan nomor 13 yaitu tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. SDGs merupakan agenda lanjutan dari agenda sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals*

(MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015. Berakhirnya MDGs dua tahun yang lalu pada kenyataannya masih meninggalkan banyak tugas bagi pemerintah Indonesia termasuk salah satunya masalah lingkungan dan perubahan iklim. Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan mengakui bahwa pertumbuhan harus inklusif dan ramah lingkungan untuk mengurangi kemiskinan dan juga membangun kemakmuran bagi penduduk. Isu-isu pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi focus bagi negara-negara di dunia, hal ini dibuktikan dengan adanya agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang terlewatkan

Upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan, tertuang dalam berbagai regulasi antara lain, pertama UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kedua UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Ketiga Undang-undang No 3.2 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat UU No 14 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 berkaitan tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hingga Instruksi Presiden No 11 Tahun 2015 tentang pengendalian hutan dan lahan. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan sudah cukup progresif terlihat dari berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah

Tingkat kerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi ekologisnya sehingga dapat menimbulkan dampak pada lingkungan yang serius seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, ketersediaan sumberdaya air dan erosi tanah. Faktor-faktor yang menekan proses kerusakan hutan Indonesia, diantaranya konversi hutan untuk pengembangan perkebunan. Cara yang paling sering ditempuh oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit adalah melakukan konversi kawasan hutan, karena mekanisme untuk mendapatkannya relatif mudah dan memperoleh keuntungan dari kayu hasil tebangan. Hampir semua pertanaman kelapa sawit yang ada sekarang adalah areal pertanaman baru berasal dari areal hutan produksi yang dikonversi (Kartodihardjo, 1999). Namun dalam pelaksanaan kebijakan pelepasan kawasan hutan, ternyata para pengusaha perkebunan besar yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan perkebunan besar kelapa sawit banyak yang tidak memanfaatkan lahan secara optimal dan bahkan lahan tersebut ditelantarkan. Data dari Dephutbun (1999) memperlihatkan banyaknya permohonan yang telah mendapatkan SIC pelepasan kawasan hutan dan izin prinsip pelepasan kawasan hutan, ternyata tidak/belum dimanfaatkan/tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sampai Maret 1998 disebutkan SK pelepasan kawasan hutan seluas 4.012.946 ha (454 perusahaan), izin prinsip pelepasan kawasan hutan seluas 3.999.654 ha (245 perusahaan) dan realisasi penanaman ternyata hanya seluas 1.751.319 ha. Banyak pengusaha yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan namun tidak memiliki hak guna tanah (HGU). Terdapat 91 perusahaan perkebunan besar swasta nasional (PBSN) di wilayah 14 Provinsi yang tidak memiliki HGU padahal

pengurusannya sudah melewati batas waktu. Lahan yang tidak memiliki HGU namun telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan luasnya mencapai 661.345,5 ha. Bahkan terdapat perusahaan yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1987, atau telah 12 tahun tidak memiliki HGU.

Berdasarkan data diatasRiau yang menjadi satu satunya Provinsi Indonesia bagian Barat dengan nilai luas hutan yang menduduki peringkat ke 6 dari seluruh Indonesia, Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kampar,Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Luas Provinsi Riau adalah 107.932.71 km², memiliki luas daratan yaitu 85,987,57 km² (79,67%), dari luas kawasan daratan ini telah di alokasikan untuk kawasan hutan seluas 5,3 juta hektar.

Indikator yang dipergunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto atau umum dikenal dengan GrossDomesticProduct (GDP). Sedangkan tolak ukur yang dimanfaatkan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yaitu PDRB. Kenaikan jumlah PDB atau PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sepanjang waktu terjadi peningkatan kapasitas produksi dari suatu perekonomian. Peningkatan tersebut akan menghasilkan semakin besarnya tingkat pendapatan, sehingga dapat menjadikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau negara meningkat.

Tabel 1.5PDRB Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Triwulanan (Juta Rupiah)				
	2021 Tahunan	2020 Tahunan	2019 Tahunan	2018 Tahunan	2017 Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	141058087	135298825	129690413	124599684	119281644
B. Pertambangan dan Penggalian	77333250	80004741	85631560	92012614	97348953
C. Industri Pengolahan	162436922	156073852	153155807	144761099	139717112
D. Pengadaan Listrik dan Gas	385540	370417	323175	284544	275067
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70263	66950	66479	65213	65361
F. Konstruksi	42630306	41491525	42898586	40367574	38275863
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46853897	42612682	48418478	46090197	43302339
H. Transportasi dan Pergudangan	3347983	3204231	4240489	4200343	4070185
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2162172	1841076	2335943	2280961	2179200
J. Informasi dan Komunikasi	5704892	5317978	4725660	4323758	4094532
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5028141	4781681	4591235	4584210	4381000
L. Real Estate	4840830	4695024	4606629	4376729	4223508
M, N. Jasa Perusahaan	22937	22598	29989	28147	26016
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8374822	8309172	8597340	8364074	8282843
P. Jasa Pendidikan	2672262	2586217	2533151	2376275	2266735
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1318956	1182516	1020003	921484	872899
R, S, T, U. Jasa lainnya	2216448	2124828	2742118	2521478	2320256
PDRB	506457708	489984311	495607055	482158385	470983512
PDRB Tanpa Migas	442013150	422744461	423626290	404162606	388634442

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2020

Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2020, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. adalah sebesar 2,18%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 2,66%. Namun menurun menjadi 2,37% pada 2020, dan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau di akhir tahun 2020 kembali naik menjadi 2,84%. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau cenderung

mengalami peningkatan, namun nilainya masih di bawah pertumbuhan PDRB rata-rata seluruh Provinsi di Pulau Sumatera. Dimana pada tahun 2020 Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan pertumbuhan PDRB paling rendah di Pulau Sumatera. Provinsi Riau hanya mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 2,84% sedangkan pertumbuhan PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2020 adalah sebesar 4,57%. Dari sajian data diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Provinsi Riau pada tahun 2017-2021 belum termasuk sukses, karena walaupun mengalami peningkatan pada nilai laju pertumbuhan PDRB, Provinsi Riau masih berada di bawah Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Maka dari hal tersebut, perlu untuk pemerintah Provinsi Riau mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan nilai laju pertumbuhan PDRB masih rendah. Sukirno memaparkan, pengukuran taraf pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah melalui perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapainya. Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik, dijelaskan bahwa faktor produksi yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yakni: teknologi, modal, dan tenaga kerja (Rustiono dalam Maisaroh, 2016). Namun Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan PDRB yang dihasilkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tahun 2018 PDRB Provinsi Riau masih memasuki urutan kelima ranking nasional, bahkan predikat yang sama sudah disandang Provinsi Riau selama 5 tahun kebelakang bahkan lebih. PDRB Provinsi Riau juga merupakan yang terbesar diluar Pulau Jawa dengan angka mencapai Rp 755,2 T, dari angka tersebut Provinsi Riau mampu berkontribusi sebesar 5,04% terhadap PDB nasional ditahun 2018. Sektor migas sebagai sumber penggerak utama perekonomian Provinsi Riau masih mendominasi, namun demikian kedepan Provinsi Riau tidak dapat terus bergantung

dengan sektor migas sebagai penggerak utama perekonomian. Perlu ditemukan substitusi sektor lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau secara berkelanjutan. Dalam periode tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat PDRB secara total dengan menghitung sektor migas perekonomian Provinsi Riau tumbuh melambat dari 2,68 % ditahun 2017 menjadi 2,34 % ditahun 2018. Pola yang sama jika mengeluarkan sektor migas ekonomi Provinsi Riau juga tumbuh melambat menjadi 3,95% dari sebelumnya 4,57% ditahun 2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua umat manusia, yang dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, lingkungan dan kebutuhan (Arifin, 2017) berpendapat faktor utama yang menentukan konsumsi adalah pendapatan. Pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan dan konsumsi yang melebihi pendapatan tersebut akan dibiayai dari tabungannya pada masa lalu. Selain itu konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa guna mendapatkan kebutuhannya, kepuasan ataupun memenuhi kebutuhan

nya.

Sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, Provinsi Riau tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan. Masalah kemiskinan, pengangguran, rendahnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah dengan mengupayakan mengontrol tingkat konsumsi yang berlebihan. Selain konsumsi, pemerintah juga harus memperhatikan dan memperhitungkan permasalahan

investasi. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi maka akan tercipta perubahan barang modal baru dan akan menyerap faktor produksi baru seperti menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan membahas tentang “PerkembanganKonversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa identifikasi masalah.

1. Terjadinya pengurangan lahan Hutan di Indonesia dari tahun ke tahun
2. Salah satu faktor yang merusak hutan konversi hutan untuk pengebangan pertambangan
3. PDRB Provinsi Riau mengalami fluktuasi namun pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami kenaikan

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan terfokus sehingga tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian dan memudahkan

penulis dalam melakukan pembahasan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada dampak perkembangan konversi hutan terhadap kelapa sawit di Provinsi Riau.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Hutan Di provinsi Riau?
2. Bagaimana Perkembangan Perkebunan Kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau ?
3. Bagaimana hubungan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perkembangan Hutan Di provinsi Riau
2. Menganalisis Perkembangan Perkebunan Kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1.6.1 Akademik

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan untuk mengetahui syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

2. Bagi penulis selanjutnya, hasil peneliti ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas bagi guna menyempurnakan penelitian tentang Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau.

1.6.2 Non Akademik

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Riau.
2. Bagi *stakeholder*, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu, prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *GrossdomesticProduct* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang salah satu indikator ekonomi makro merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi. Di mana, Negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya.

Terdapat 3 (tiga) metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (*ProductionApproach*), pendekatan pengeluaran (*ExpenditureApproach*), dan pendekatan pendapatan (*IncomeApproach*).

a. Pendekatan Produksi (*ProductionApproach*)

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif. Cara ini menghasilkan *Gross National Product* atau GNP. Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (valueadded) dari masing-masing lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Pendapatan produksi terbagi menjadi 9 sektor utama, yaitu :

- 1) Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- 2) Sektor pertambangan
- 3) Sektor industri
- 4) Sektor listrik, gas dan air bersih
- 5) Sektor konstruksi
- 6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Sektor pengangkutan dan komunikasi
- 8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Sektor jasa lainnya.

Rumus pendapatan nasional untuk pendekatan produksi :

$$Y = \sum P_n \cdot Q_n \dots\dots\dots (2-1)$$

Dimana :

Y = pendapatan nasional

P_n = harga jual produk jadi

Q_n = jumlah produk diproduksi

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan (*income approach*) adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, misalnya:

- Tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah
- Pemilik modal akan mendapat bunga
- Pemilik tanah dapat memperoleh sewa
- Keahlian atau skill dapat memperoleh laba

Rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = r + w + i + p \dots\dots\dots (2-2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

r = Upah/gaji

w = Sewa

i = Bunga

p = Laba Usaha

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat kedalam barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Masing-masing sektor perekonomian yaitu :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi (I)
- 3) Pengeluaran konsumsi Pemerintah (G)
- 4) Ekspor netto (X-M)

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (2-3)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara.

Adapun komponen pendapatan nasional yaitu :

- a) *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di Wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor.
- b) *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai seluruh produk yang diproduksi seluruh masyarakat nasional di dalam dan di luar negeri pada periode tertentu.
- c) *Net National Product* (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN) adalah nilai GNP yang berubah karena penyusutan harga barang-barang modal.
- d) *National Income*(NI) atau Pendapatan Nasional (PN) adalah pendapatan agregat yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi. Pendapatan nasional mengukur pendapatan agregat yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebelum pajak (*direct taxes*) dan pembayaran transfer (*transfer payment*).

- e) *Personal Income*(PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP) adalah nilai NI yang dikurangi jaminan sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah pembayaran pindahan (*transfer payment*). Pembayaran pindahan adalah tunjangan yang diberikan Negara kepada individu untuk mensejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan seseorang.
- f) *DisposableIncome* (DI) atau Pendapatan Bebas (PB) adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga yang siap untuk dibelanjakan atau digunakan. Pendapatan *Disposable* diperoleh dengan cara Pendapatan Nasional dikurangi Pajak perorangan (*personal taxes*) dan kewajiban-kewajiban bukan pajak (*nontaxesliabilities*).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro,2004).

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Todaro (2006), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk

ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Klasik

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith merupakan salah satu tokoh klasik yang menggagas mengenai teori ekonomi, termasuk teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan ekonomi.

a) Pertumbuhan Output Total

Terdapat tiga unsur pokok dalam sistem produksi yaitu :

1. Tersedianya sumber daya alam yang menjadi batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Apabila sumber daya manusia yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal, maka jumlah penduduk dan persediaan barang modal yang tersedia akan ikut berperan dalam pertumbuhan output. Namun, jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara maksimal, maka pertumbuhan output tersebut akan terhenti.
2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) dalam proses pertumbuhan output akan beradaptasi dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
3. Persediaan barang modal termasuk dalam unsur produksi sebagai penentuan tingkat output dan berperan dalam proses pertumbuhan output. persediaan barang modal berpengaruh terhadap tingkat output total.

Adam Smith berpendapat bahwa jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot dan akibatnya akan mengurangi semangat para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal dan dalam jangka panjang tingkat keuntungan akan menurun

b) Pertumbuhan Penduduk

Adam Smith mengemukakan pendapatnya bahwa jumlah penduduk akan meningkat apabila standar upah yang berlaku lebih tinggi dan standar upah subsisten. Adam Smith juga berpendapat bahwa tingkat upah yang tinggi dan meningkat apabila cepatnya pertumbuhan akan permintaan tenaga kerja

daripada penawaran tenaga kerja. Namun persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat sebagai penentu permintaan akan tenaga kerja.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori yang dikemukakan Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Salah satu ciri perekonomian David Ricardo yaitu bahwa akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk investasi. Gagasan dari David Ricardo mengenai pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal yaitu *thelawofdiminishingreturn*. Gagasan ini berisi tentang bagaimana penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah sebagaimana penurunan produk maginal karena terbatasnya jumlah tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja.

B. Teori Pertumbuhan Mazhab Neo Klasik

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert M. Solow

Teori pertumbuhan neo-klassik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Robert M. Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$AY = f (AK,AL,AT)$$

Dimana :

AY : tingkat pertumbuhan ekonomi

AK : tingkat pertumbuhan sosial

AL : tingkat pertumbuhan penduduk

AT : tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis Solow selanjutnya berbentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

C. Teori Pertumbuhan Endogen

Mankiw (2006) Teori pertumbuhan endogen yaitu teori yang menolak asumsi model Solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar (eksogen). Kita mulai dengan fungsi produksi sederhana ;

$$Y = AK,$$

Di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan pertumbuhan Solow. Bagaimana fungsi produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya .

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal (ΔK) sama dengan investasi (sY) dikurangi depresiasi (δK). Menggabungkan persamaan ini

dengan fungsi produksi $Y = AK$, kita dapatkan : $\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$ Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output $\Delta Y/Y$, lihatlah selama $sA > \delta$, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang 55 pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.

Namun, penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika K diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal.

2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu walaupun bukan satu- satunya. (Todaro, 2011).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. (Siagian, 1983). Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan social, tujuan ekonomi social, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P.Siagian, 2005).

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat. (Kuncoro,2004). Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan (growth plus change)

dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum ataupun berkembang. (Subandi, 2011).

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan pertumbuhan nasional bruto (Gross National Income) perkapita (pertumbuhan moneter dari GNI perkapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan – seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata – rata penduduk. (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi dimasa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sector pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan perdesaan. (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. (Todaro & Smith, 2011). Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan

waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. (Sunasi,2004).

Pembangunan ekonomi adalah usaha- usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. (Irawan dan Suparmoko, 1992). Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting. Tidak bias dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal public) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan system saluran pembuangan. (Mankiw, 2003). Hal serupa di jelaskan oleh Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu adalah factor penting dan menentukan tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Todaro (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa factor penting yaitu:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiscal dan sumber daya manusia (human resources), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian di

investasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumber daya yang telah ada.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkat ukuran pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sederhananya, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya penemuan cara- cara baru dengan memperbaiki cara- cara lama yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tradisional.

Dalam studi mengenai infrastruktur, pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan teori neo klasik yang dikembangkan oleh Solow. Model pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa perekonomian berbagai negara akan bertemu pada tingkat pendapatan yang sama, dengan syarat negara- negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja dan produktivitas yang sama (Todaro, 2006) .

2.2 Regulasi

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya

alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.

Berasarkan fungsi hutan dibedakan menjadi 4 bagian yaitu :

a. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah.

b. Hutan Suaka Alam

Hutan Suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Hutan suaka alam terdiri dari Cagar alam dan Suaka margasatwa.

c. Hutan Wisata

Hutan Wisata adalah hutan yang diperuntukan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman Wisata, Taman Baru dan Taman Laut.

d. Hutan Produksi

Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan berarti hak untuk mengatur pola pemakaian sendiri atau mengalihkan sumber daya (Agrawal dan Ostrom 2001: 489) Pengelolaan dipahami sebagai sekumpulan keputusan, penerapan, dan konsep yang melibatkan pembuat keputusan di luar pemanfaatan langsung sumber daya, jadi perencanaan untuk pemanfaatan mendatang Pengelolaan hutan tidak berurusan dengan produk atau jasa tertentu Meskipun dalam penistilahan teknis administrasi hutan negara adalah 'rencana pengelolaan hutan biasanya merujuk pada pengelolaan kayu bulat (pembalakan), pengelolaan pada hakikatnya dapat saja untuk perlindungan (termasuk perlindungan atau pemeliharaan tempat-tempat suci), reforestasi, hasil hutan nonkayu (termasuk pembayaran jasa lingkungan, pariwisata, karbon), kayu atau untuk beragam barang dan jasa pada waktu bersamaan, pengelolaan dapat saja mencakup bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau untuk dijual. Mengalihkan hutan untuk penggunaan lain juga merupakan keputusan pengelolaan

Pengelolaan Hutan di Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda-beda tuap jenis hutannya. Pengelolaan hutan lindung berbeda dengan pengelolaan hutan produksi, begitu juga yang lainnya. Sebelum kita masuk untuk mempelajari kebijakan pengelolaannya, teman-teman harus paham tentang jenis jenis hutan Teman teman bisa memnbaca di UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (www.dephut.go.id)

Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang mencakup Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Cagar Biosfer dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam)

UU No. 41/1999 dan PP No 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasa hutan bukan kayu (HHBK) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung. Selain itu tatahutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,serta pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007.

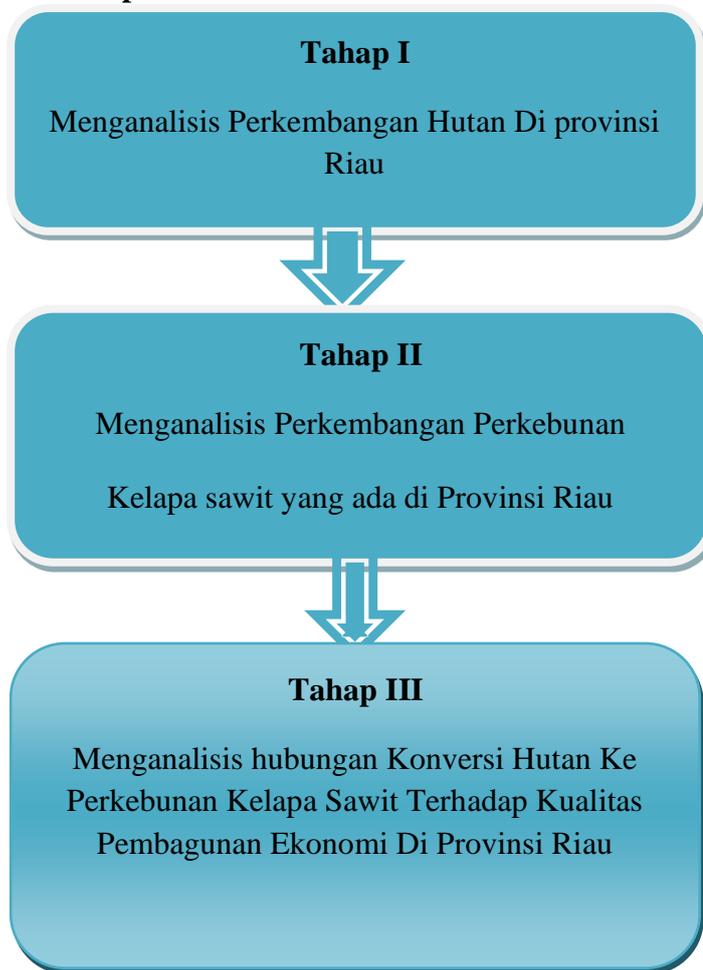
2.3 Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun	JUDUL	Hasil penelitian
Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung /2017	Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial, industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi,

		serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO ₂ dan menghasilkan O ₂ serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
Yaeri Badrun dan Mubarak/ 2010	Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global	Pengundulan Hutan demi kebun kelapa sawit akan memicu perubahan iklim global dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global. Hilangnya keanekaragaman hayati akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit
Ari Wibowo / 2010	Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim Dan Kebijakan	Anaman kelapa sawit sebagai komoditi perkebunan yang banyak dikembangkan di Indonesia telah meningkat dengan pesat, menjadi sekitar 7.8 juta ha pada tahun 2009. Pertumbuhan pesat tanaman sawit disebabkan oleh nilai ekonomi tanaman ini yang seringkali harus dibayar mahal karena bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Perluasan pembangunan sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan. Salah satu kawasan hutan dengan tingkat kandungan karbon yang tinggi adalah lahan gambut. Alih fungsi kawasan hutan termasuk pada lahan gambut untuk pengembangan tanaman kelapa sawit masih akan terjadi. Besarnya kandungan karbon pada lahan gambut yang akan terlepas menjadi emisi apabila lahan gambut tersebut dikonversi, didrainase dan mudah terbakar memerlukan perhatian khusus dan kebijakan untuk menanganinya.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1. Kerangka Konseptual Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Dalam Penelitian ini yaitu :

1. H_0 = Tidak Adanya Pengaruh Luas Hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau
 H_1 = Adanya Pengaruh Luas Hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau
2. H_0 = Tidak Adanya Pengaruh Konversi Hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau

H2 = Adanya Pengaruh Konversi Hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau

3. H0 = Tidak Adanya Pengaruh Luas Hutan dan konversi hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau

H3 = Adanya Pengaruh Jumlah Hutan dan konversi Hutan Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen, kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan sebagai gabungan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna

pada generalisasi. Dalam hal ini penelitian yang di maksud adalah penelitian yang lebih mengandalkan dan mengemukakan kesimpulan kesimpulan secara deskriptif dan bukan angka angka. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencatat segala fenomena yang di lihat dan di dengar serta di baca peneliti (via wawancara, catatan lapangan, buku/majalah dan lain lain yang di anggap dapat menguatkan penelitian)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan dengan melihat data hutan, perkebunan kelapa sawit diwilayah Riau yang dipublikasi oleh bada Pusat Statistik dll.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yaitu Juli 2022 samapaiAgustu 2022.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variable yang diamati adalah sebagai berikut :

Table 3-1
Definisi Operasional
Model Ekonometrika

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Pendapatan Perkapita	Seberapa besar pendapatan masyarakat riau	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id
Luas Hutan	Luas hutan yang ada di provinsi riau	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

Konversi Hutan	Jumlah perubahan luas wilayah	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id
----------------	-------------------------------	---

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kuantitatif yang bersifat deskriptif.

b. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada yang dapat di peroleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan, data terkait juga dapat di ambil melalui surat kabar, buku, internet maupun publikasi lainnya.

Adapun data sekunder yang terkait dengan penelitian ini dapat di peroleh dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Badan Pengadaan Pembangunan Daerah, serta data-data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, baik buku, jurnal dan situs internet pendukung lainnya.

4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder meliputi jumlah hutan, Konversi lahan , gambaran umum, serta informasi lain yang menunjang penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas buku referensi, jurnal, internet, dan studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait serta sumber lain yang dapat menunjang penelitian yang ingin dicapai.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisa Deskriptif Kualitatif

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder dimana data dianalisis secara deskriptif kemudian disajikan dengan bantuan diagram atau kurva.

3.5.2 Analisa Model Ekonometrika

Penelitian ini ingin mengetahui hubungan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PP_t = \alpha_0 + \alpha_1 JH_t + \alpha_2 KH_t + \varepsilon_t$$

Dimana : PP_t = Pendapatan Perkerta pada tahun t

JH_t = Luas Hutan pada tahun t

KH_t = Konversi Hutan pada tahun t

α_0 = Koefisiensi regresi

$\alpha_1, \alpha_2,$ = Parameter dari setiap variabel

A. Metode Estimasi

Penelitian inidengan menggunakan data runtun waktu (*timeseries*) dengan kurun waktu 10 tahun atau lebih. Analisis tren dalam kurun waktu tersebut dapat di analisis menggunakan model regresi linear menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS

(*ordinary least square*) dalam bentuk model regresi berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance term = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*)
diantaradisturbancetern $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbancetern $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ^i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas
(x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collienarity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*).

B. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*BlueLinearUnbiasedEstimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiapobservasi dalam sampel. Secara singkat

dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila di dandu adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai

DurbinWatson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003)

C. Tahapan Analisis

1) Penaksiran

a. Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Koefisien Determinasi (D)

Menurut Gujarati (Kuncoro, 2013) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R^2

2) Pengujian

a. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Uji t dilakukan untuk melihat korelasi secara parsial dari masing-masing variabel bebas yang diamati terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Hipotesa

- Jumlah Hutan (JH)

$H_0 : \alpha_1 = 0$ (Jumlah Hutan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita)

$H_a : \alpha_1 \neq 0$ (Jumlah Hutan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita)

- Konversi Hutan (KH)

$H_0 : \alpha_2 = 0$ (Konversi hutan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita)

$H_a : \alpha_2 \neq 0$ (Konversi Hutan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita)

- Jumlah Tenaga Kesehatan (JTK)

b. Uji F Statistik atau Uji Smultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Kuncoro, 2013)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model ekonometrik menunjukkan apakah Jumlah Hutan dan Konversi Hutan secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel Pendapatan perkapita. Langkah – langkah pengujian.

1) Hipotesa

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ (Jumlah Hutan dan Konversi Hutan secara bersama-sama tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan perkapita)

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 \neq 0$ (Jumlah Hutan dan Konversi Hutan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan perkapita)

Uji Statistik F

$$F_{hitung} = \frac{(R^2/k-1)/((1-R^2)/(n-k)) ,$$

dimana: k = Jumlah parameter yang diestimasi dan n = Jumlah data

2) Kriteria uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Kondisi Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau secara geografis, geokonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. memiliki wilayah yang cukup luas dan berada di bagian tengah Pulau Sumatera. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 87.023,66 km. Berdasarkan letak astronomis, Provinsi Riau terletak antara 02° 25' LU-01° 15 LS dan 100° 03'-104° 00 BT.

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Riau memiliki batas wilayah seperti berikut:

Utara : Sumatra Utara dan Selat Malaka

Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatra Barat

Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara

Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka

B. Demografi

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Provinsi Riau pada bulan September 2020 sebanyak 6,39 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 855,72 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 85,57 ribu setiap tahun. Sementara itu, rasio jenis kelamin

Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 105,11. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Riau tahun 2020 mencapai 73,48 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.555,28 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Pelalawan sebesar 30,57 jiwa/km².

Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 983,36 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 841,33 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 654,91 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita ini.

C. Iklim

Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meterologi Indragiri Hulu di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai.

Dari lima wilayah tersebut, selama tahun 2020, suhu tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Februari dengan maksimal suhu sebesar 38,00 derajat celsius, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Desember dengan suhu sebesar 20,00 derajat celsius.

Dari lima wilayah tersebut, curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Bulan April sebesar 506,2 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kota Pekanbaru pada Bulan Februari sebesar 30,00 mm. Sedangkan jumlah hari hujan, terbanyak terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan November yaitu 24 hari, sedang Kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan terjadi di Kabupaten Pelalawan pada bulan Juni yaitu 4 hari.

4.2 Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Riau

Kawasan hutan merupakan habitat alami flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya membentuk suatu rantai makanan di dalam hutan yang saling berkaitan satu sama lain. Definisi kawasan hutan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1 Angka 3), bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Manfaat pelestarian hutan bagi lingkungan sangat banyak, secara global hutan merupakan paru-paru dunia dan dapat mengurangi pemanasan suhu bumi, mencegah kekeringan saat kemarau dan mencegah banjir dan longsor saat musim hujan. Berikut ini merupakan perkembangan Luas Hutan Provinsi Riau.

Tabel 4.1 Luas Hutan Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Jumlah Luas Hutan		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	310073.00	537580.59	319575.00
Indragiri Hulu	542603.00	800809.96	532814.00
Indragiri Hilir	709220.00	1297629.28	693380.00
Pelalawan	876947.00	1275434.24	872641.00
Siak	420589.00	769910.30	415799.00
Kampar	571600.00	1035877.81	548201.00
Rokan Hulu	383189.00	776022.09	393646.00

Bengkalis	589883.00	862762.89	604770.00
Rokan Hilir	556916.00	880225.53	552279.00
Kepulauan Meranti	260537.00	359268.42	259756.00
Pekanbaru	4203.00	63157.15	4196.00
Dumai	166576.00	207145.74	155445.00
RIAU	5392336.00	8865824.00	5352502.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas peningkatan luas Hutan provinsi Riau dari tahun 2019 – 2021 berjalan fluktuatif. Dimana, pada tahun 2019 luas hutan provinsi Riau mencapai 5.392.336 hektar, mengalami peningkatan menjadi 8.865.824 hektar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan luas hutan menjadi 5352502 hektar lebih kecil dari pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari kabupaten di provinsi Riau, kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten dengan luas hutan terbesar terbesar di provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 872.641 hektar pada tahun 2021, urutan kedua dengan luas hutan terluas di tempati oleh kabupaten Indragiri Hilir dengan luas hutan sebesar 693.380 hektar.

Berdasarkan fungsinya hutan dapat di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Berikut ini merupakan perkembangan hutan di provinsi Riau berdasarkan fungsinya

1. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk kegiatan eksploitasi dalam rangka pemanfaatan hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu tersebut diatur dalam berbagai bentuk perizinan pengelolaan hutan, seperti:

- Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
- Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Selanjutnya, hutan produksi dibagi menjadi 3 jenis hutan, yakni Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konservasi (HPK).

a) Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi demi memperoleh hasil hutan melalui cara tebang pilih atau tebang habis. Hutan Produksi Tetap biasanya berupa area hutan yang memiliki topografi landah dan jenis tanah rendah erosi, serta curah hujan sedikit.

Berikut ini merupakan perkembangan Hutan Produksi Tetap Provinsi Riau 2019 – 2021.

Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Hutan Produksi Tetap		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	87181.00	0.00	93550.00
Indragiri Hulu	119664.00	32423.75	122555.00
Indragiri Hilir	228709.00	376913.42	227740.00
Pelalawan	612069.00	17871.98	606818.00
Siak	326679.00	193936.65	324702.00
Kampar	163160.00	36697.14	147948.00
Rokan Hulu	54939.00	49150.46	64184.00
Bengkalis	330848.00	233174.60	343736.00
Rokan Hilir	237546.00	268803.17	233321.00
Kepulauan Meranti	42962.00	-	42807.00
Pekanbaru	1279.00	-	1278.00
Dumai	130415.00	127935.66	121265.00
RIAU	2335450.00	1336906.83	2329904.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas peningkatan luas Hutan Produksi Tetap (HPT) provinsi Riau dari tahun 2019 – 2021 berjalan fluktuatif. Dimana, pada tahun 2019 luas HPT sebesar 2.335.450 hektar, mengalami penurunan menjadi 1.336.906,83 hektar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan HPT menjadi 2.329.904 hektar lebih luas dari pada tahun 2019. Berkurangnya luas HPT di sebabkan oleh menurunnya kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang berdampak pada berkurangnya luas wilayah produksi. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemic covid-19 yang berdampak pada terhentinya kegiatan ekonomi dan mengakibatkan berkurangnya modal masyarakat pengelola hutan sehingga terjadi degradasi wilayah produksi

Apabila dilihat dari kabupaten pada tahun 2021 kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten dengan HPT terbesar di provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 606.818 hektar, urutan kedua dengan HPT terluas di tempati oleh kabupaten Bengkalis dengan luas HPT sebesar 343.736 hektar dan wilayah dengan HPT terkecil terdapat di kota Pekanbaru dengan luas wilayah HPT sebesar 1.278 hektar.

b) Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan produksi yang khusus untuk eksploitasi kayu dalam intensitas rendah. Metode dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dengan cara tebang pilih. HPT umumnya kawasan hutan yang berada di wilayah pegunungan dengan lereng-lereng curam.

Berikut ini merupakan luas Hutan Produksi Terbatas Provinsi Riau 2019 – 2020.

Tabel 4.3 Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Hutan Produksi Terbatas
-----------	-------------------------

	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	53182.00	119678.85	54903.00
Indragiri Hulu	79567.00	265116.40	79424.00
Indragiri Hilir	152316.00	236575.89	151569.00
Pelalawan	64183.00	676325.37	62964.00
Siak	6310.00	203668.21	6120.00
Kampar	114980.00	344706.77	115439.00
Rokan Hulu	120264.00	180894.17	118713.00
Bengkalis	110471.00	236085.33	110098.00
Rokan Hilir	150758.00	257510.27	151850.00
Kepulauan Meranti	150174.00	117646.29	149754.00
Pekanbaru	579.00	10253.24	577.00
Dumai	12218.00	15497.98	11754.00
RIAU	1015003.00	2663958.77	1013165.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas peningkatan luas Hutan Produksi Terbatas provinsi Riau dari tahun 2019 – 2021 berjalan fluktuatif. Dimana, pada tahun 2019 luas Hutan Produksi Terbatas sebesar 1.015.003 hektar, mengalami peningkatan menjadi 2.663.958,77 hektar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.013.165 hektar lebih rendah dari pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari kabupaten pada tahun 2021 kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan Hutan Produksi Terbatas terbesar di provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 151.859 hektar, urutan kedua dengan Hutan Produksi Terbatas terluas di tempati oleh kabupaten Indragini Hilir dengan luas Hutan Produksi Terbatas sebesar 151.569 hektar dan wilayah dengan Hutan Produksi Terbatas terkecil terdapat di kota Pekanbaru dengan luas wilayah Hutan Produksi Terbatas sebesar 577 hektar.

c) Hutan Produksi Konservasi

Hutan Produksi Konservasi adalah hutan cadangan yang berfungsi untuk wilayah pembangunan di luar hutan. Penetapannya dilakukan dengan memilih

hutan produksi yang tidak produktif yang dimanfaatkan untuk wilayah cadangan pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Berikut ini merupakan Hutan Produksi Konservasi provinsi Riau tahun 2019 – 2020.

Tabel 4.4 Luas Hutan Produksi Konversi 2019 - 2021

Kabupaten	Hutan Produksi Konversi		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	76055.00	288937.51	75830.00
Indragiri Hulu	170106.00	343802.80	157558.00
Indragiri Hilir	288503.00	673483.85	274602.00
Pelalawan	66060.00	528723.44	68587.00
Siak	13483.00	318624.35	11417.00
Kampar	132772.00	515513.40	127134.00
Rokan Hulu	136061.00	460908.43	137756.00
Bengkalis	65779.00	320938.75	68247.00
Rokan Hilir	149595.00	351724.43	148017.00
Kepulauan Meranti	59600.00	237632.81	59412.00
Pekanbaru	1618.00	52903.91	1616.00
Dumai	20376.00	61087.53	18859.00
RIAU	1180008.00	4154281.21	1149035.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas peningkatan luas Hutan Produksi Konversi provinsi Riau dari tahun 2019 – 2021 berjalan fluktuatif. Dimana, pada tahun 2019 luas Hutan Produksi Terbatas sebesar 1.180.008 hektar, mengalami peningkatan menjadi 4.154.281,21 hektar pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.149.035 hektar lebih rendah dari pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari kabupaten pada tahun 2021 kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan Hutan Produksi Konversi terbesar di provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 274.602 hektar, urutan kedua dengan Hutan Produksi Konversi terluas di tempati oleh kabupaten Indragini Hulu dengan luas Hutan Produksi Konversi sebesar 157.558 hektar dan wilayah dengan Hutan Produksi

Konversi terkecil terdapat di kota Pekanbaru dengan luas wilayah Hutan Produksi Konversi sebesar 1.616 hektar.

2. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi karena bermanfaat untuk menjaga ekosistem. Penetapan area hutan lindung didasarkan kepada fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih (tata kelola air), penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi hutan lainnya.

Wilayah Hutan Lindung dapat terbentuk secara alami maupun buatan dengan area yang luas dan berisi ragam flora dan fauna. Hutan Lindung bisa dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas yang peduli terhadap kelestarian hutan.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1 Angka 8), pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Tujuan dari pemanfaatan hutan lindung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta menumbuhkan kesadaran agar fungsi hutan tetap terjaga dan lestari.

Berikut ini merupakan data perkembangan luas wilayah Hutan Lindung Provinsi Riau tahun 2019 – 2021

Tabel 4.5 Luas Hutan Lindung Provinsi Riau tahun 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	42038.00	64912.04	41159.00
Indragiri Hulu	20327.00	56957.65	21034.00
Indragiri Hilir	20005.00	10656.12	19896.00

Pelalawan	9284.00	-	9247.00
Siak	79.00	-	79.00
Kampar	53657.00	54256.99	52554.00
Rokan Hulu	70579.00	85069.03	71646.00
Bengkalis	31.00	-	31.00
Rokan Hilir	11569.00	-	11636.00
Kepulauan Meranti	2503.00	-	2494.00
Pekanbaru	0.00	-	-
Dumai	0.00	-	-
RIAU	230072.00	271851.83	229776.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kawasan Hutan Lindung Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 229.776 hektar mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 271.851,83 hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu satu tahun provinsi Riau telah mengalami kehilangan hutan sebesar 42.075,83 hekta dari tahun 2019 – 2020.

Apabila dilihat dari luas wilayah berdasarkan kabupaten/kota tahun 2021, Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten dengan luas kawasan Hutan Lindung paling besar di provinsi Riau dimana, luas wilayah Hutan Lindung sebesar 71/646 hektar. Urutan kedua dengan luas paling besar yaitu kabupaten Kampar dengan luas kawasan Hutan Lindung sebesar 52.554 hektar. Sedangkan Kota Dumai dan Kota Pekanbaru merupakan kabupaten/kota yang tidak memiliki kawasan Hutan Lindung di provinsi Riau.

3. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi atau hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam adalah kawasan hutan yang dilindungi atau diproteksi untuk tujuan pelestarian hutan dan kehidupan didalamnya agar berjalan sesuai fungsinya. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup.

Berikut ini merupakan perkembangan Hutan Konservasi Provinsi Riau tahun 2019 – 2021.

Tabel 4.6 Luas Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (hektar)

Kabupaten	Suaka Alam dan Pelestarian Alam		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	51616.00	64052.19	54133.00
Indragiri Hulu	152939.00	102509.36	152243.00
Indragiri Hilir	19687.00	-	19573.00
Pelalawan	125351.00	52513.44	125025.00
Siak	74038.00	53681.10	73481.00
Kampar	107031.00	84713.50	105126.00
Rokan Hulu	1346.00	-	1347.00
Bengkalis	82755.00	72564.20	82658.00
Rokan Hilir	7448.00	2187.66	7455.00
Kepulauan Meranti	5299.00	3989.33	5289.00
Pekanbaru	727.00	-	725.00
Dumai	3568.00	2654.58	3567.00
RIAU	631805.00	438865.36	630622.00

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kawasan Hutan Konservasi Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 2630.622 hektar mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 438.865,36 hektar sedangkan pada tahun 2019 luas hutan konservasi provinsi Riau sebesar 631.805 hektar. Artinya sejak kurun waktu 3 tahun belakangan tahun 2019 merupakan tahun dimana wilayah konservasi provinsi Riau masih tinggi.

Apabila dilihat dari luas wilayah berdasarkan kabupaten/kota tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kabupaten dengan luas kawasan Hutan Konversi paling besar di provinsi Riau dimana, luas wilayah Hutan Konversi sebesar 152.243 hektar. Urutan kedua dengan luas paling besar yaitu kabupaten Kampar

dengan luas kawasan Hutan Konservasi sebesar 125.025 hektar. Sedangkan kabupaten/kota yang tidak memiliki kawasan Hutan Konversi paling kecil di provinsi Riau adalah kota Pekanbaru.

4.3 Perkembangan Kelapa Sawit Provinsi Riau

Provinsi Riau termasuk salah satu daerah agraris dimana sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani pekebun dimana komoditi utamanya adalah Kelapa Sawit. Berikut ini merupakan luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau.

Tabel 4.7 Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau 2017 – 2021 (ribu hektar)

Provinsi	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (Ribu Hektar)				
	2021	2020	2019	2018	2017
RIAU	2 860.80	2 853.80	2 741.50	2 706.90	2 209.60

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah perkebunan kelapa sawit di provinsi riau setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimana, pada tahun 2017 luas wilayah perkebunan kelapa sawit mencapai 2.209,60 ribu hektar, mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 2.760,90 hektar dan hingga pada tahun 2019 – 2021 juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 luas wilayah perkebunan kelapa sawit sebesar 2.741,50 ribu hektar, pada tahun 2020 sebesar 2.853,80 ribu hektar, hingga pada tahun 2021 mencapai 2.860,80 ribu hektar. Selain jumlah Luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit riau, dibawah ini merupakan jumlah luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Kabupaten atau kota pada tahun 2018-2019.

Tabel 4.8 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten

Kabupaten	Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa sawit	
	2018	2019
Kuantan Singingi	128699	128750
Indragiri Hulu	118969	118969
Indragiri Hilir	227802	227802
Pelalawan	325241	325241
Siak	347058	317552
Kampar	413590	418236
Rokan Hulu	410306	480665
Bengkalis	186724	186724
Rokan Hilir	282289	282289
Kepulauan Meranti	0	0
Pekanbaru	10929	12714
Dumai	38350	38433

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada provinsi riau kabupaten yang paling banyak memiliki luas lahan Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yaitu pada kabupaten Kampar yang memiliki luas sebesar 413.306 hektar di tahun 2018 dan di tahun 2019 sebesar 418.236hektar, hal ini memiliki arti pada kabupaten kampar mengalami perkembangan untuk luas lahan kelapa sawit. Untuk diurutan kedua yang memiliki luas lahan tersebar yaitu pada kabupaten rokan hulu, pada tahun 2018 rokan hulu memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 410.306 hektar dan di tahun 2019 sebesar 480.665 hektar. Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat adanya perubahan luas wilayah yang cukup signifikan.

Peningkatan luas wilayah perkebunan kelapa sawit juga dibarengi dengan peningkatan produksi kelapa sawit di provinsi Riau. Dimana, peningkatan produksi tanaman kelapa sawit dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Riau 2017 – 2021 (ribu ton)

Provinsi	Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (Ribun Ton)				
	2021	2020	2019	2018	2017

RIAU	8 629.10	9 984.30	9 512.90	8 496.00	7 591.20
------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 – 2020 produksi kelapa sawit di provinsi Riau terus mengalami kenaikan. Dimana, pada tahun 2017 produksi perkebunan kelapa sawit mencapai angka 7.591,20 ribu ton, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 8.496 ribu ton, pada tahun 2019 sebesar 9.512,90 ribu ton, pada tahun 2020 sebesar 9.984,30 ribu ton. Sedangkan, pada tahun 2021 produksi tanaman perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 8.629,10 ribu ton. Selain Produksi tanaman perkebunan kelapa sawit riau, dibawah ini merupakan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Kabupaten atau kota pada tahun 2018-2019.

Tabel 4.10Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten

Kabupaten	Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa sawit	
	2018	2019
Kuantan Singingi	452218	450804
Indragiri Hulu	286243	469273
Indragiri Hilir	733009	731009
Pelalawan	1339609	1339609
Siak	1193290	1098665
Kampar	1222465	955735
Rokan Hulu	1195460	1195460
Bengkalis	334066	334066
Rokan Hilir	813834	813832
Kepulauan Meranti	-	0
Pekanbaru	31219	36612
Dumai	82122	41195

Sumber : Badan pusat statistik Provinsi Riau, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada provinsi riau kabupaten yang paling banyak memiliki hasil produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yaitu pada kabupaten Kampar yang memiliki produksi sebesar 1.222.465 ton di tahun 2018 dan di tahun 2019 sebesar 955.735hektar, hal ini memiliki arti pada kabupaten

kampar mengalami penurunan untuk produksi hasil kelapa sawit. Untuk di urutan kedua yang memiliki produksi terbanyak yaitu pada kabupaten rokan hulu, pada tahun 2018 rokan hulu memiliki hasil produksi perkebunan kelapa sawit sebesar 1.195.460ton dan di tahun 2019 sebesar 1.195.460ton Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat tidak adanya perubahan hasil produksi. Dari keseluruhan kabupaten terdapat kabupaten yang tidak memiliki luas lahan kelapa sawit hingga hasil produksi kelapa sawit, kabupaten tersebut adalah kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemerintah daerah Riau mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: Pertama, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; Keempat, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya.

4.4 Analisa Model Ekonometrtika

4.4.1 Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran varianceinflationfactor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka tolerance mendekati Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadiMultikolinearitas.

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

VarianceInflationFactors			
Date: 09/13/22 Time: 14:50			
Sample: 2019Q1 2021Q4			
Includedobservations: 12			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	21.42610	6504.662	NA
LH	0.141562	8754.060	3.104901
KH	0.005423	269.3421	3.104901

Sumber: E-Views 10 dan diolah

Hasil uji di atas menunjukkan nilai Centered VIF Variabel Luas Hutan (LH) lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), dan Pada variabel Konversi Hutan (KH) lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) maka artinya bahwa dalam hasil regresi di atas tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Heterokesdatisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:134). Pengujian dilakukan dengan Uji Glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregresabsolutresidual. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji glejser adalah:

- a. Jika nilai signifikansi $Obs \cdot R\text{-Squared} > 0.05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $Obs \cdot R\text{-Squared} < 0.05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.067241	Prob. F(2,9)	0.3838
Obs*R-squared	2.300401	Prob. Chi-Square(2)	0.3166
Scaled explained SS	2.760500	Prob. Chi-Square(2)	0.2515

Sumber: E-Views 10 dan diolah

Berdasarkan hasil di atas dimana nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai $prob. Chi\ Square(2)$ pada $Obs \cdot R\text{-squared}$ yaitu sebesar 0,3166. Oleh karena itu p value $0,3166 > 0,05$ berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Ghozali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW). Pada Hasil pengujian dan diperoleh nilai *DurbinWatson* sebesar 0,178033.

Tabel 4.13 Uji Autokorelasi

R-squared	0.883501	Mean dependent var	1894300.
Adjusted R-squared	0.857612	S.D. dependent var	309277.1
S.E. of regression	116703.6	Akaike info criterion	26.38498
Sum squared resid	1.23E+11	Schwarz criterion	26.50621
Log likelihood	-155.3099	Hannan-Quinn criter.	26.34010
F-statistic	34.12688	Durbin-Watson stat	0.178083
Prob(F-statistic)	0.000063		

Sumber: E-Views 10 dan diolah

4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (*R Square*) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi pertama yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi setelah dilakukan pengujian Variabel, dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.883501, artinya secara bersama-sama Variabel Luas Hutan (LH), dan Konversi Hutan (KH) mampu menjelaskan variabel pendapatan perkapita sebesar 88,3%. Sedangkan 11,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

4.4.3 Interpretasi Hasil

Analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Pada penelitian ini, uji analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* meliputi Luas Hutan, dan Konversi Hutan, terhadap variabel *Dependen*

yaitu Pendapatan perkapita. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PP				
Method: Least Squares				
Date: 09/13/22 Time: 14:47				
Sample: 2019Q1 2021Q4				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.08E+08	13358792	-8.091865	0.0000
LH	109.6413	13.32007	8.231283	0.0000
KH	-128.0571	15.56500	-8.227249	0.0000
R-squared	0.883501	Mean dependent var	1894300.	
Adjusted R-squared	0.857612	S.D. dependent var	309277.1	
S.E. of regression	116703.6	Akaike info criterion	26.38498	
Sum squared resid	1.23E+11	Schwarz criterion	26.50621	
Log likelihood	-155.3099	Hannan-Quinn criter.	26.34010	
F-statistic	34.12688	Durbin-Watson stat	0.178083	
Prob(F-statistic)	0.000063			

Sumber: E-Views 10 dan diolah

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ Luas Hutan}_t + \alpha_2 \text{ Luas konversi} + \varepsilon_t$$

$$\text{Pendapatan Perkapita} = -1.08E+08 + 109.6413 \text{ Luas Hutan}_t - 128.0571 \text{ Luas konversi} + \varepsilon_t$$

Koefisien $\alpha_0 = -1.08E+08$, artinya jika angka Luas Hutan dan Konversi Hutan tidak ada atau = 0 maka Pendapatan Perkapita ditahun t sebesar -1.08E+08.

Koefisien $\alpha_1 = 109.6413$, artinya jika Luas Hutanselama 1 tahun meningkat sebesar 1Hektar, maka Pendapatan Perkapitamengalami kenaikan sebesar 109.6413.

Koefisien $\alpha_2 = -128.0571$, artinya jika Konversi Hutan selama 1 tahun meningkat sebesar 1Hektar, maka Pendapatan Perkapita mengalami Turun sebesar -128.0571.

4.4.4 Interpretasi Hasil Uji T dan Uji F

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Perkapita, terdapat nilai konstanta sebesar $-1.08E+08$ yang bernilai negatif.

4.4.4.1 Uji Statistik T

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel Luas Hutan, Konversi Hutan terhadap Pendapatan Perkapita.

Tabel 4.5 Uji statistic T

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.08E+08	13358792	-8.091865	0.0000
LH	109.6413	13.32007	8.231283	0.0000
KH	-128.0571	15.56500	-8.227249	0.0000

Sumber: E-Views 10 dan diolah

Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai t_{tabel} dengan cara $df(n)-k = 12 - 2 = 10$ dengan ($\alpha=5\%$) maka nilai t_{tabel} sebesar 2.22814. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Luas Hutan

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel adalah 109.6413 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Nilai *probability* dari Nilai Transaksi Keuangan sebesar 0.000 ($<0.05\%$) dan nilai t hitung yang di hasilkan sebesar 8.231283 (>2.22814). Hal ini menunjukkan adanya Pengaruh antara Luas Lahan terhadap Pendapatan Perkapita.

2. Konversi Lahan

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel adalah -128.0571 dimana variabel tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Nilai *probability* dari variabel Jumlah Penduduk Indonesia adalah sebesar 0.000 ($<0.05\%$) dan nilai *t* hitung yang di hasilkan sebesar -8.227249 (<2.36462). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel Konversi Hutan Indonesia Terhadap Pendapatan Perkapita.

4.4.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

F-statistic	34.12688
Prob(F-statistic)	0.000063

Sumber: E-Views 10 dan diolah

Dari hasil regresi dengan menggunakan *autoregressive* variabel Luas Hutan dan Konversi hutan terhadap Pendapatan Perkapita memiliki nilai *probability* (F statistic) sebesar 0.000063 dan nilai F statistic sebesar 34.12688 . Maka dengan nilai ini dapat disimpulkan bahwasanya variabel independent Bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tahun 2017 produksi perkebunan kelapa sawit mencapai angka 7.591,20 ribu ton, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 8.496 ribu ton, pada

tahun 2019 sebesar 9.512,90 ribu ton, pada tahun 2020 sebesar 9.984,30 ribu ton. Sedangkan, pada tahun 2021 produksi tanaman perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 8.629,10 ribu ton.

2. Variabel Luas Hutan dan Konversi hutan terhadap Pendapatan Perkapita memiliki nilai probabilitas (F statistic) sebesar 0.000063 dan nilai F statistic sebesar 34.12688

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menganalisis 5 tahun penelitian yaitu tahun 2017-2021,
2. Penelitian ini belum melakukan pengujian lebih dalam seperti sebab dan akibat
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel yang umum seperti Luas hutan, Konversi Lahan dan pendapatan perkapita .

5.3 Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat mempertahankan jumlah luas hutan yang ada, dengan mengingat hutan merupakan tempat yang harus dilestarikan .
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan dan wilayah hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal A, Ostrom E. 2001. Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. *Politics and Society* 29(4):485-514.

Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: Kelompok Gramedia

Bachrawi, Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta; Jakarta.

Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Badrun, Yeeri, and Mubarak. 2010. "Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global." In Seminar Dan Lokakarya Revitalisasi Dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau, 171–79.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan. (1999). Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dephutbun RI. Jakarta.

Departemen Kehutanan Indonesia (www.dephut.go.id)

Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Irawan, Suparmoko. 1992. *Ekonomi pembangunan*, edisi pertama. Yogyakarta: BPFPE.

Jan Horas V. Purba, Tungkot Sipayung. 2017. Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*.43 (1).

Kartodihardjo H, Murtilaksono K dan Sudadi U. 2004. *Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan*. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Mankiw, N. Gregory.2006. *Pengantar teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Selemba Empat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

Sadyohutomo, M. 2008. *Management Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Siagian, Sondang. 1983. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. PT. Gunung Agung. Jakarta
- Sondang P.Siagian, 2005. Filsafat Administrasi, Jakarta: CV. Gunung Agung
- Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Tinambunan, Erika., L. Setyobudi dan A. Saryanto. 2014. Penggunaan Beberapa Jenis Mulsa terhadap Pertumbuhan Produksi Baby Wortel (*Daucuscarota L.*) Varietas Hibrida. *Jurnal Produksi Tanaman* 1 (2): 25-30.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. "Pembangunan Ekonomi". Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P Michael. 2011. "Pembangunan Ekonomi". Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, Ari. 2010. Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim Dan Kebijakan. *E-Journal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. Vol 7(4)

Lampiran 1 DATA PENELITIAN

Tahun	Pengeluaran Perkapita	Luas Hutan (Hektar)	Konversi hutan (hektar)
2017	10677	5.406.992,00	2 860.80
2018	10968	5.406.992,00	2 853.80
2019	11255	5392336.00	2 741.50
2020	10657	8865824.00	2 706.90
2021	10736	5352502.00	2 209.60

Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha (miliar rupiah)

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Harga Konstan 2010				
	2021	2020	2019	2018	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 403 710.00	1 378 331.40	1 354 399.10	1 307 253.00	1 258 375.70

B. Pertambangan dan Penggalian	822 099.50	790 475.20	806 206.20	796 505.00	779 678.40
C. Industri Pengolahan	2 284 821.70	2 209 920.30	2 276 667.80	2 193 368.40	2 103 466.10
D. Pengadaan Listrik dan Gas	114 861.10	108 826.40	111 436.70	107 108.60	101 551.30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9 919.20	9 449.30	9 004.90	8 429.40	7 985.30
F. Konstruksi	1 102 517.70	1 072 334.80	1 108 425.00	1 048 082.80	987 924.90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 450 226.30	1 385 747.40	1 440 185.70	1 376 878.70	1 311 746.50
H. Transportasi dan Pergudangan	406 187.60	393 437.90	463 125.90	435 336.50	406 679.40
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	310 754.70	299 122.40	333 304.60	315 068.60	298 129.70
J. Informasi dan Komunikasi	696 460.40	652 062.90	589 536.10	538 762.70	503 420.70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	464 638.60	457 482.90	443 093.10	415 620.60	398 971.40
L. Real Estate	333 282.90	324 259.40	316 901.10	299 648.20	289 568.50
M,N. Jasa Perusahaan	197 106.70	195 671.10	206 936.20	187 691.10	172 763.80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364 233.40	365 439.30	365 538.80	349 277.60	326 514.30
P. Jasa Pendidikan	350 655.30	350 264.60	341 349.90	321 133.80	304 810.80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157 104.70	142 228.40	127 487.90	117 322.20	109 497.50
R,S,T,U. Jasa lainnya	200 772.90	196 608.70	205 011.40	185 405.60	170 174.80
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	11 118 868.50	10 723 054.80	10 949 155.40	10 425 851.90	9 912 928.10

Luas Hutan di Indonesia Tahun 2017-2020

Tahun	Luas Hutan
2017	125.922.474,73
2018	125.921.113,73
2019	125.817.021,96
2020	125.817.021,96

Luas Hutan Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	3.563.813,00	3.563.813,00	3.550.390,23	3.550.390,23
2	Sumatera Utara	3.055.795,00	3.055.795,00	3.055.795,00	3.055.795,00

3	Sumatera Barat	2.380.057,00	2.380.057,00	2.380.057,00	2.380.057,00
4	Riau	5.406.992,00	5.406.992,00	5.406.992,00	5.406.992,00
5	Jambi	2.098.535,00	2.098.535,00	2.098.535,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	3.457.858,00	3.456.797,00	3.456.797,00	3.456.797,00
7	Bengkulu	924.631,00	924.631,00	924.631,00	924.631,00
8	Lampung	1.004.735,00	1.004.735,00	1.004.735,00	1.004.735,00
9	Kep. Bangka Belitung	643.615,00	643.615,00	643.615,00	643.615,00
10	Kepulauan Riau	382.132,10	381.832,10	381.832,10	381.832,10
11	DKI Jakarta	108.475,45	108.475,45	108.475,45	108.475,45
12	Jawa Barat	816.603,00	816.603,00	816.603,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	757.250,00	757.250,00	757.250,00	757.250,00
14	D.I Yogyakarta	16.819,52	16.819,52	16.819,52	16.819,52
15	Jawa Timur	1.361.146,00	1.361.146,00	1.361.146,00	1.361.146,00
16	Banten	253.254,00	253.254,00	253.254,00	253.254,00
17	Bali	130.686,01	130.686,01	130.686,01	130.686,01
18	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,00	1.046.959,00	1.046.959,00	1.046.959,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,00	1.742.399,00	1.742.399,00	1.742.399,00
20	Kalimantan Barat	8.389.600,00	8.389.600,00	8.389.600,00	8.389.600,00
21	Kalimantan Tengah	12.719.707,00	12.719.707,00	12.719.707,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Selatan	1.779.982,00	1.779.982,00	1.779.982,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	13.833.112,65	13.833.112,65	13.831.942,65	13.831.942,65
24	Sulawesi Utara	764.739,00	764.739,00	764.739,00	764.739,00
25	Sulawesi Tengah	4.274.687,00	4.274.687,00	4.274.687,00	4.274.687,00
26	Sulawesi Selatan	2.725.796,00	2.725.796,00	2.636.297,00	2.636.297,00
27	Sulawesi Tenggara	3.830.579,00	3.830.579,00	3.830.579,00	3.830.579,00
28	Gorontalo	824.668,00	824.668,00	824.668,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	1.092.376,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	3.919.617,00	3.919.617,00	3.919.617,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	2.515.220,00	2.515.220,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua Barat	9.713.137,00	9.713.137,00	9.713.137,00	9.713.137,00

33	Papua	30.387.499,00	30.387.499,00	30.387.499,00	30.387.499,00
Indonesia		125.922.474,73	125.921.113,73	125.817.021,96	125.817.021,96

PDRB Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Triwulanan (Juta Rupiah)				
	2021 Tahunan	2020 Tahunan	2019 Tahunan	2018 Tahunan	2017 Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	141058087	135298825	129690413	124599684	119281644
B. Pertambangan dan Penggalian	77333250	80004741	85631560	92012614	97348953
C. Industri Pengolahan	162436922	156073852	153155807	144761099	139717112
D. Pengadaan Listrik dan Gas	385540	370417	323175	284544	275067
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70263	66950	66479	65213	65361
F. Konstruksi	42630306	41491525	42898586	40367574	38275863
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46853897	42612682	48418478	46090197	43302339
H. Transportasi dan Pergudangan	3347983	3204231	4240489	4200343	4070185
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2162172	1841076	2335943	2280961	2179200
J. Informasi dan Komunikasi	5704892	5317978	4725660	4323758	4094532
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5028141	4781681	4591235	4584210	4381000
L. Real Estate	4840830	4695024	4606629	4376729	4223508
M, N. Jasa Perusahaan	22937	22598	29989	28147	26016
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8374822	8309172	8597340	8364074	8282843
P. Jasa Pendidikan	2672262	2586217	2533151	2376275	2266735
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1318956	1182516	1020003	921484	872899
R, S, T, U. Jasa lainnya	2216448	2124828	2742118	2521478	2320256
PDRB	506457708	489984311	495607055	482158385	470983512
PDRB Tanpa Migas	442013150	422744461	423626290	404162606	388634442

Luas Hutan Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Jumlah Luas Hutan		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	310073.00	537580.59	319575.00
Indragiri Hulu	542603.00	800809.96	532814.00

Indragiri Hilir	709220.00	1297629.28	693380.00
Pelalawan	876947.00	1275434.24	872641.00
Siak	420589.00	769910.30	415799.00
Kampar	571600.00	1035877.81	548201.00
Rokan Hulu	383189.00	776022.09	393646.00
Bengkalis	589883.00	862762.89	604770.00
Rokan Hilir	556916.00	880225.53	552279.00
Kepulauan Meranti	260537.00	359268.42	259756.00
Pekanbaru	4203.00	63157.15	4196.00
Dumai	166576.00	207145.74	155445.00
RIAU	5392336.00	8865824.00	5352502.00

Luas Hutan Produksi tetap (hektar)

Kabupaten	Hutan Produksi Tetap		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	87181.00	0.00	93550.00
Indragiri Hulu	119664.00	32423.75	122555.00
Indragiri Hilir	228709.00	376913.42	227740.00
Pelalawan	612069.00	17871.98	606818.00
Siak	326679.00	193936.65	324702.00
Kampar	163160.00	36697.14	147948.00
Rokan Hulu	54939.00	49150.46	64184.00
Bengkalis	330848.00	233174.60	343736.00
Rokan Hilir	237546.00	268803.17	233321.00
Kepulauan Meranti	42962.00	-	42807.00
Pekanbaru	1279.00	-	1278.00
Dumai	130415.00	127935.66	121265.00
RIAU	2335450.00	1336906.83	2329904.00

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Riau 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Hutan Produksi Terbatas		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	53182.00	119678.85	54903.00
Indragiri Hulu	79567.00	265116.40	79424.00
Indragiri Hilir	152316.00	236575.89	151569.00
Pelalawan	64183.00	676325.37	62964.00
Siak	6310.00	203668.21	6120.00
Kampar	114980.00	344706.77	115439.00
Rokan Hulu	120264.00	180894.17	118713.00

Bengkalis	110471.00	236085.33	110098.00
Rokan Hilir	150758.00	257510.27	151850.00
Kepulauan Meranti	150174.00	117646.29	149754.00
Pekanbaru	579.00	10253.24	577.00
Dumai	12218.00	15497.98	11754.00
RIAU	1015003.00	2663958.77	1013165.00

Luas Hutan Produksi Konversi 2019 - 2021

Kabupaten	Hutan Produksi Konversi		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	76055.00	288937.51	75830.00
Indragiri Hulu	170106.00	343802.80	157558.00
Indragiri Hilir	288503.00	673483.85	274602.00
Pelalawan	66060.00	528723.44	68587.00
Siak	13483.00	318624.35	11417.00
Kampar	132772.00	515513.40	127134.00
Rokan Hulu	136061.00	460908.43	137756.00
Bengkalis	65779.00	320938.75	68247.00
Rokan Hilir	149595.00	351724.43	148017.00
Kepulauan Meranti	59600.00	237632.81	59412.00
Pekanbaru	1618.00	52903.91	1616.00
Dumai	20376.00	61087.53	18859.00
RIAU	1180008.00	4154281.21	1149035.00

Luas Hutan Lindung Provinsi Riau tahun 2019 – 2021 (hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	42038.00	64912.04	41159.00
Indragiri Hulu	20327.00	56957.65	21034.00
Indragiri Hilir	20005.00	10656.12	19896.00
Pelalawan	9284.00	-	9247.00
Siak	79.00	-	79.00
Kampar	53657.00	54256.99	52554.00
Rokan Hulu	70579.00	85069.03	71646.00
Bengkalis	31.00	-	31.00

Rokan Hilir	11569.00	-	11636.00
Kepulauan Meranti	2503.00	-	2494.00
Pekanbaru	0.00	-	-
Dumai	0.00	-	-
RIAU	230072.00	271851.83	229776.00

Luas Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (hektar)

Kabupaten	Suaka Alam dan Pelestarian Alam		
	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	51616.00	64052.19	54133.00
Indragiri Hulu	152939.00	102509.36	152243.00
Indragiri Hilir	19687.00	-	19573.00
Pelalawan	125351.00	52513.44	125025.00
Siak	74038.00	53681.10	73481.00
Kampar	107031.00	84713.50	105126.00
Rokan Hulu	1346.00	-	1347.00
Bengkalis	82755.00	72564.20	82658.00
Rokan Hilir	7448.00	2187.66	7455.00
Kepulauan Meranti	5299.00	3989.33	5289.00
Pekanbaru	727.00	-	725.00
Dumai	3568.00	2654.58	3567.00
RIAU	631805.00	438865.36	630622.00

Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau 2017 – 2021 (ribu hektar)

Provinsi	Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (Ribuan Hektar)				
	2021	2020	2019	2018	2017
RIAU	2 860.80	2 853.80	2 741.50	2 706.90	2 209.60

Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten

Kabupaten	Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa sawit	
	2018	2019

Kuantan Singingi	128699	128750
Indragiri Hulu	118969	118969
Indragiri Hilir	227802	227802
Pelalawan	325241	325241
Siak	347058	317552
Kampar	413590	418236
Rokan Hulu	410306	480665
Bengkalis	186724	186724
Rokan Hilir	282289	282289
Kepulauan Meranti	0	0
Pekanbaru	10929	12714
Dumai	38350	38433

Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten

Kabupaten	Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa sawit	
	2018	2019
Kuantan Singingi	452218	450804
Indragiri Hulu	286243	469273
Indragiri Hilir	733009	731009
Pelalawan	1339609	1339609
Siak	1193290	1098665
Kampar	1222465	955735
Rokan Hulu	1195460	1195460
Bengkalis	334066	334066
Rokan Hilir	813834	813832
Kepulauan Meranti	-	0
Pekanbaru	31219	36612
Dumai	82122	41195

Lampiran 2 Output

Uji Multikolinearitas

VarianceInflationFactors			
Date: 09/13/22 Time: 14:50			
Sample: 2019Q1 2021Q4			
Includedobservations: 12			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	21.42610	6504.662	NA
LH	0.141562	8754.060	3.104901
KH	0.005423	269.3421	3.104901

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.067241	Prob. F(2,9)	0.3838
Obs*R-squared	2.300401	Prob. Chi-Square(2)	0.3166
Scaled explained SS	2.760500	Prob. Chi-Square(2)	0.2515

Uji Autokorelasi

R-squared	0.883501	Meandependentvar	1894300.
Adjusted R-squared	0.857612	S.D. dependentvar	309277.1
S.E. of regression	116703.6	Akaike info criterion	26.38498
Sum squared resid	1.23E+11	Schwarz criterion	26.50621
Log likelihood	-155.3099	Hannan-Quinn criter.	26.34010
F-statistic	34.12688	Durbin-Watsonstat	0.178083
Prob(F-statistic)	0.000063		

Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PP				
Method: Least Squares				
Date: 09/13/22 Time: 14:47				
Sample: 2019Q1 2021Q4				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.08E+08	13358792	-8.091865	0.0000
LH	109.6413	13.32007	8.231283	0.0000
KH	-128.0571	15.56500	-8.227249	0.0000
R-squared	0.883501	Meandependentvar	1894300.	
Adjusted R-squared	0.857612	S.D. dependentvar	309277.1	
S.E. of regression	116703.6	Akaike info criterion	26.38498	
Sum squared resid	1.23E+11	Schwarz criterion	26.50621	
Log likelihood	-155.3099	Hannan-Quinn criter.	26.34010	
F-statistic	34.12688	Durbin-Watsonstat	0.178083	
Prob(F-statistic)	0.000063			



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1, Medan, Telp. 061.6624967, Kode Pos 20228

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2214/IDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/12/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 12/2/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elva Nurli Ningsih
NPM : 1805180001
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Bencana Alam (Kebakaran Hutan)
2. Konversi Hutan Ke Perkebunan Sawit
3. Kerusakan Ekosistem

Rencana Judul : 1. Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau
2. Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Di Kecamatan Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu
3. Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Bagi Umkm Di Desa Bengkel

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pusat Statistik (Bps), Menteri Kehutanan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Elva Nurli Ningsih)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mubtahir Harul No. 3, Medan, Telp. (061) 4624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nome Agenda: 2214/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/12/2/2022

Nama Mahasiswa : Elva Nuria Ningsih
NPM : 1805180003
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal Pengajuan Judul : 12/2/2022
Nama Dosen Pembimbing¹⁾ :

Lailan Safina Hs.

Judul Disetujui²⁾

Perkembangan Konversi Hutan ke Perkebunan
Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan
Ekonomi Di Provinsi Riau

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prayidya Hariani RS, SE., M.Si.)

Medan, 04-03-2022

Dosen Pembimbing

Dr. Lailan Safina Hs., Msi

Keterangan

¹⁾ Data oleh Kepala Program Studi

²⁾ Data oleh Dosen Pembimbing

Setelah disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, apabila dan apabila kemudian ke-2 ini pada foto akan "Tanda Pengesahan Judul Resmi"

Lampiran ini disediakan oleh Jila Nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

Halaman ke 2 dari 2 halaman



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : ELVA NURLIA NINGSIH
NPM : 1805180003
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL PROPOSAL : PERKEMBANGAN KONVERSI HUTAN KE PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
16/03/2022	Perbaiki Pendahuluan (Latar belakang) Sesuai dengan arahan. Masukkan data pendukung		
7/04/2022	- Perbaiki Identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan Penelitian sesuai dengan koreksi. - Perbaiki penulisan perumusan tabel		
24/05/2022	- Tambahkan teorinya sesuai dengan Judul		
07/06/2022	- Di Pendahuluan bagian akhir uraikan tentang kualitas pembangunan ekonomi - karena mau mengesetimasikan, tambahkan hipotesis pada akhir bab 2 - membuat daftar Pustaka		
10/06/2022	Telah selesai diperiksa dan setuju untuk seminar proposal		

Pembimbing

Dra. LAILAN SAFINA Hsb, M.Si

Medan, 29 Juli 2022
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

N a m a : Elva Nurlla Ningsih
N .P.M. : 1805180003
Tempat / Tgl.Lahir : Tanah Datar, 10 Juli 2000
Alamat Rumah : Jalan Gunung Sinabung No. 28 Medan
Judul Proposal :Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau
Bab I	Perbaiki Latar Belakang
Bab II	
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan,

TIM SEMINAR

an Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Reimbimbing

Dr. Lailan Safina Hsb, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

an

Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M. Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari menerangkan bahwa:

Nama : Elva Nurlla Ningsih
N .P.M. : 1805180003
Tempat / Tgl.Lahir : Tanah Datar, 10 Juli 2000
Alamat Rumah : Jalan Gunung Sinabung No. 28 Medan
JudulProposal :Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dra. Lailan Safina Hsb, M.Si*

Medan,

TIM SEMINAR

ah.Ketua


Dr.Prawidya Hairani RS,SE.,M.Si.

Pembimbing


Dra. Lailan Safina Hsb, M.Si

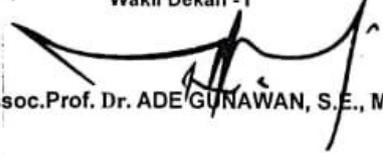
Sekretaris


Dra.Hj.Roewija Hafni, M.Si.

ah.Pemanding


Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M. Si

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I


Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ELVA NURLIA NINGSIH
NPM : 1805180003
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jalan Gunung Sinabung No. 28, Glugur Darat II, Medan Timur
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KONVERSI HUTAN KE PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TEHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10-08-2022	Perhatikan dan perbaiki: Koreksi yg ada, al. - data ² tlg luas hutan dst - deskripsi daerah pemenuh - judul sub bab - sumber tabel	} h	
23-08-2022	- Perhatikan lagi analisis untuk menjawab pertanyaan penelahan ke 2. - Perhatikan alur analisis untuk tujuan penelahan ke 3. - Hipotesis harus diuji. - Perbaiki kesimpulan dan saran - Masalah ke lampiran dan uraian - Perhalus abstrak.	} h	
17-08-2022	Teluh selesai diperbaiki dan sehyi untuk uraian	} h	

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si.

Medan, September 2022
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI FENILITAN & PENGEMBANGAN PEMIPAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akademi/2020
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 822405 - 8224067 Fax. (061) 8224218 - 8211003
http://feb.umsu.ac.id feko@umsu.ac.id |umsu.medan |umsu.medan |umsu.medan |umsu.medan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2648 / TGS / ILJ-AU / UMSU-05 / F / 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **9/6/2022**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Elva Nurli Ningsih**
N P M : **1805180003**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Perkembangan Konversi Hutan Ke Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau**

Dosen Pembimbing : **Dra.Hj.Lailan Syafina, M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkanya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 September 2023**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Shafar 1444 H
06 September 2022 M



Dekan
H. JANURI, SE., MM., M.Si.
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Peringgal

1. DATA PRIBADI

Nama : Elva Nurlia Ningsih
NPM : 1805180003
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Datar, 10 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam
No. Telepon : 082284523155
Email : elvanurlianingsih@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

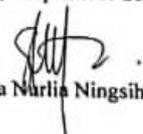
2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : ALM. H.Sudiono
Nama Ibu : Hj. Suparmi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2006-2012 : SDN 020 Kunto Darussalam
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 03 Kunto Darussalam
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 01 Ujung Batu
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Medan, September 2022


Elva Nurlia Ningsih